

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Suara Kedu
Media Online	.....

Wilayah: Kabupaten Kebumen

Halaman 14

## BPK Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Pemkab Kebumen

**KEBUMEN** - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Wabup Ristawati Purwaningsih, serta sejumlah pimpinan OPD menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng. Rapat bersama BPK di Ruang Aroengbinang, Kompleks Pendapa Kabumian, Rabu (27/4) itu, terkait pembenahan sistem pemerintahan agar semakin akuntabel dan transparan.

"Ini rapat koordinasi dengan BPK tentang penguatan sistem pemerintahan agar pemerintahan ini bisa bersih, transparan, dan akuntabel, terutama dalam penggunaan anggarannya," ujar Bupati Arif Sugiyanto usai rapat.

Bupati menyampaikan BPK bekerja melakukan audit di Kebumen selama dua bulan. Dalam kajian BPK, memang ada beberapa harus dilakukan pembenahan terkait sistem pengelolaan pemerintahan sehingga bisa semakin baik dan akuntabel.

Ada beberapa rekomendasi BPK untuk diselesaikan atau dibenahi sebelum 17 Mei 2022. Yakni data penggunaan BPJS Kesehatan, kemudian pajak, penggunaan aset jalan yang belum bersertifikat, serta penggunaan aset daerah yang lain.

"Kalau di BPJS Kesehatan misalnya masih ditemukan orang yang sudah meninggal dan pindah tempat/kabupaten tapi masih dibiayai negara. Ini menjadi catatan agar bisa dibenahi. Kemudian pajak-pajak yang belum diambil pemerintah, juga penggunaan aset pemerintah belum jelas peruntukannya serta aturannya," terangnya.

### Membenahi

Bupati meminta dinas terkait segera membenahi apa yang menjadi rekomendasi dari BPK. Dia mengingatkan pihaknya akan selalu menerapkan reward and punishment bagi seluruh pegawainya.

Asnita, Senior Auditor BPK dari perwakilan Jateng menambahkan pemeriksaan ini dilakukan tak lain untuk mendukung sistem pemerintahan di Kebumen agar semakin baik, transparan, dan akuntabel. Dia melihat selama melakukan pemeriksaan, pemerintah sangat kooperatif.

"Saya menilai selama pemeriksaan ini sudah sangat kooperatif, dan komitmen dari pimpinannya sudah bagus," ujar Asnita.

Hal ini terbukti dalam rapat koordinasi kali dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1, Inspektorat, BPKPD serta para staf. Biasanya dia menyebut rapat koordinasi hanya dihadiri oleh beberapa pimpinan saja.

Agar pemerintahan ini semakin baik, Asnita meminta masyarakat aktif memberi pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, masyarakat juga diminta patuh aturan pemerintah. Misalnya soal ketaatan membayar pajak dll.(J19-36)